

Komitmen Keislaman dan Kebangsaan Pelajar Islam Indonesia: Telaah terhadap Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia

Parid Ridwanuddin; Universitas Paramadina Jakarta; parid@gmail.com

Abstract

Indonesian Muslim Student, known in Indonesia as Pelajar Islam Indonesia (PII) is an Islamic movement that emerged in the post independent era of the Republic of Indonesia in May 4th 1947. The historical imperative of this movement is twofold; (1) to modernize Islamic teachings and (2) to Islamize modernity. This project was born out of the situation of Muslims in Indonesia in the early period of post-independence where Muslims were divided by debates on serious issue such as the relation between the state and religion as well as other issues such as the superiority of religious education represented by the pesantrens over the secular ones represented by public schools inherited mostly from the Dutch colonial government. In that settings, Indonesian Muslim Student as a social organization offered a more holistic approach integrating Islamic and Nationalistic approaches towards social movement.

Keywords: Indonesian Muslim Student, PII, Post-colonial Indonesia, and Social Movement.

Abstrak

Pelajar Islam Indonesia (PII) merupakan gerakan Islam yang lahir pada era pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1947. Proyek historis gerakan ini adalah melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu melakukan modernisasi (pemahaman) Islam dan Islamisasi modernitas. Proyek ini dilatari oleh kondisi umat Islam di Indonesia yang saat itu terbelah ke dalam perdebatan mengenai hubungan serius antara agama dan kebangsaan serta perdebatan antara superioritas pendidikan agama yang direpresentasikan oleh lembaga pesantren melawan pendidikan umum yang direpresentasikan oleh sekolah-sekolah umum yang didesain oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam konteks itulah, PII lahir menawarkan pandangan holistik yang mengintegrasikan pandangan keislaman dengan pandangan keindonesiaan menjadi visi gerakan.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Indonesia Pasca-Kolonial, Pelajar Islam Indonesia, dan PII.

A. Latar Belakang

Kajian mengenai gerakan sosial Islam di Indonesia tak pernah habis. Indonesia telah menjadi laboratorium penting untuk menguji keabsahan teori-teori gerakan sosial (Islam) yang telah dikonstruksi oleh para ahli selama ini. Secara garis besar, gerakan sosial Islam Indonesia, dapat dibaca dengan memperhatikan dua hal: pertama, idea, gagasan atau paradigma gerakan. Pendekatan ini hendak mencari substansi sekaligus tipologi pemikiran keislamannya; kedua, wadah gerakan sebagai institusionalisasi dari idea, gagasan paradigma keislaman tertentu. Jika pada pendekatan pertama hendak mengetahui substansi dan tipologi pemikirannya, maka melalui pendekatan kedua, dapat diketahui manifestasi sekaligus pelembagaan dari idea atau paradigma gerakan sosial Islam.

Pembahasan mengenai tipologi paradigma keislaman di Indonesia sangat variatif dan dinamis. Dalam kajian-kajian awal, kita hanya mengenal tipologi paradigma keislaman modernis dan tradisional. Kajian ini sebagaimana dapat ditemukan dalam karya Deliar Noer.¹²⁷ Kini, Tipologi tersebut telah memudar. Kajian-kajian selanjutnya menunjukkan bahwa tipologi lama itu tidak berlaku lagi karena telah lahir tipologi-tipologi baru sebagai kritik atau sintesis terhadap tipologi sebelumnya. Tipologi-tipologi baru yang bisa disebut disini diantaranya adalah fundamentalisme, neo-modernis, neo-tradisionalis, transformatif, dan lain sebagainya. tipologi-tipologi ini lahir karena dinamika internal sekaligus dinamika eksternal yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia.¹²⁸

Segaris dengan itu, kajian mengenai wadah gerakan saat ini sudah sangat variatif, meski belum dikatakan dinamis. Selama ini, kajian mengenai wadah gerakan Islam di Indonesia, mayoritas masih diwarnai oleh kajian mengenai organisasi massa seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam dan NU; partai politik,

¹²⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996).

¹²⁸ Lihat: Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986); M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995); Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamâ'at Al-Islâmî (Pakistan)*, terj. Mun'im A Sirry, (Jakarta: Paramadina, 1999); Greg Barton, *Gagasan Islam liberal di Indoensia: Telaah Terhadap Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

seperti PSII, dan Masyumi; pemikiran intelektual muslim, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid; Perkumpulan atau organisasi cendekiawan, seperti ICMI; jaringan muda muslim, seperti JIL dan JIMM, gerakan politik ekstra parlementer (HTI) dan organisasi-organisasi sosial yang memperjuangkan formalisasi syari'at Islam seperti MMI, FPI dan Laskar Jihad.

Melihat peta kajian gerakan Islam tersebut di atas, masih terdapat satu entitas penting yang belum banyak dikaji dan dianggap memiliki peran pinggiran dalam kajian Islam Indonesia, yaitu gerakan pelajar (*student movement*). Padahal gerakan ini telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan identitas keislaman dan kebangsaan sekaligus.

Pelajar (*student*) merupakan entitas terpenting aktor politik di Indonesia sejak munculnya gagasan mengenai nasionalisme Indonesia. Bahkan, keberadaannya memainkan peranan penting dalam meletakkan dasar-dasar gerakan nasionalisme Indonesia pada abad ke-20.¹²⁹ Beberapa gerakan pelajar yang dapat disebutkan antara lain; Jong Islamieten Bond (JIB) yang didirikan pada tahun 1925 di Jakarta; Studenten Islam Studieclub (SIS) yang didirikan pada tahun 1934 di Jakarta dan Djami'ah al-Chairiah (Persatuan Kemerdekaan Indonesia) sebuah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Islam Indonesia di Kairo yang berperan menerjemahkan literatur-literatur berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Gerakan-gerakan inilah yang berhasil menyuntikan inspirasi bagi berdirinya gerakan-gerakan pemuda-pelajar pada fase pasca-kemerdekaan.¹³⁰

Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah salah satu gerakan pelajar Islam yang lahir dari rahim umat Islam pasca kemerdekaan. Sebagai bagian dari umat Islam Indonesia, PII –sebagaimana juga organisasi yang lain– mempunyai cita-cita untuk berjuang merebut kemerdekaan dan mengeluarkan umat dari keteringgalan serta keterbelakangan akibat dari penjajahan panjang yang dialami oleh bangsa Indonesia.

¹²⁹ Muhammad Wildan, *Student and Politics; the Response of the Pelajar Islam Indonesia (PII) to Politisc in Indonesia*, (Tesis S2 di Leiden University, 1999), 1.

¹³⁰ Yudi Latief, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Mizan: Bandung, 2005), 305-315.

Senafas dengan tujuan organisasi pelajar yang mendahuluinya, PII memiliki proyek historis yaitu melakukan Islamisasi modernisasi sekaligus modernisasi Islam. Hal ini bisa dibaca dari maksud pendirian PII; menyatukan para pelajar Muslim di sekolah-sekolah agama (santri) dan sekuler (non-santri) dalam rangka menciptakan intelek-ulama sekaligus ulama-intelek. Bagi PII, penyatuan ini sangat diperlukan untuk memperkuat Islam dalam perjuangan nasional.

B. Sejarah Kebangkitan PII

Sejarah Kebangkitan PII tidak dapat dilepaskan dari kondisi umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Selama menjajah Indonesia, Belanda menerapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut: pertama, kebijakan netral terhadap agama. Kebijakan ini dalam prakteknya ternyata berbeda. Sampai tahun-tahun terakhir kekuasaannya, pemerintah Belanda lebih banyak campur tangan terhadap agama. Kesulitan pemerintah Belanda bersikap netral karena politik identitas antara Islam dan Kristen. Pada umumnya pemeluk Islam pasti orang bumiputra, sedangkan orang Kristen pada umumnya dianut oleh penjajah; kedua, politik asosiasi kebudayaan. Intisari politik ini adalah menghendaki agar di bidang kemasyarakatan bumiputra menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda. Jalan yang ditempuh adalah melalui asosiasi dan pemanfaatan adat serta asosiasi pendidikan; ketiga, memberikan perhatian secara khusus dan serius pada perkembangan paham tarekat dan Pan-Islamisme. Bagi Belanda, dua gerakan ini sangat potensial untuk menimbulkan fanatisme di kalangan umat Islam. Ketiga kebijakan ini kemudian diolah dan di administrasikan oleh *Kantoor Voor Islandsche Zaken*, yakni suatu institusi yang berwenang memberikan nasihat kepada pemerintah dalam masalah-masalah bumiputra.¹³¹

Sementara itu, menurut Adaby Darban, inti dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda adalah melakukan usaha-usaha untuk menghalangi

¹³¹ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 9-64.

perkembangan dan kebangkitan agama Islam dengan cara yang halus (*soft power*). Kebijakan tersebut ditempuh dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:¹³²

Pertama, “kristening politik”, yaitu suatu usaha untuk melemahkan kekuatan bumiputra dengan jalan memasukan pengaruh agama lain di tanah jajahan. Tindakan seperti ini dilaksanakan dengan menggunakan kesucian agama untuk kepentingan kolonialisme. Di Indonesia, hal ini dilakukan Belanda pada masa kekuasaan Gubernur Jendral Idenburg. Pada masa inilah politik pengkristenan terhadap seluruh penduduk nusantara dilakukan sedikit demi sedikit secara sistematis dan terencana. politik ini pada intinya bukanlah untuk memperkuat kekuasaan penjajah di bumi nusantara dalam waktu selama mungkin. Politik model ini memang memungkinkan bila mengingat pertimbangan kekuatan penjajah yang kalah terhadap mayoritas umat Islam.

Berdasarkan hal itu, pemerintah Belanda memberikan bantuan dan pengembangan agama Kristen. Melalui restu Ratu Belanda sejak 1901, dibukalah zending Kristen untuk beroperasi di Indonesia. Tindak lanjut dari hal ini adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah kristen. Sekolah-sekolah inilah yang memberikan andil yang cukup besar dalam menyokong perkembangan agama kristen di Indonesia dan terutama dalam menyukseskan politik pemeintah kolonial Belanda.¹³³

Kedua, politik asosiasi, yakni politik untuk menghubungkan antara dunia Barat dan Timur. Dengan politik ini diharapkan kebudayaan barat akan mudah masuk ke Nusantara. Implikasi berikutnya tentu akan membuat Belanda semakin lama bercokol di Nusantara karena pengaruh kedekatan kebudayaan tersebut. Politik ini dilaksanakan dengan mengambil sebagian dari bumiputra untuk dididik dengan kehidupan dan budaya gaya Barat. Selanjutnya, kelompok ini akan

¹³² Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Panitia Daerah Muktamar XIV Pelajar Islam Indonesia, 1976), 7-9. Bandingkan dengan Drs. H. Ahmad Adaby Darban, “Refleksi Kilas Balik Berdirinya PII,” dalam HM. Natsir Zubaidi dan Lukman Fathullah Rais, *Pak Timur Menggores Sejarah: PII Menyiapkan Kader Umat dan Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 229-231.

¹³³ F.L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), 295-296.

dijadikan sebagai pegawai pemerintah atau orang-orang yang memegang kekuasaan guna membantu pemerintah kolonial.¹³⁴

Tidak berbeda dengan Belanda, Jepang selama sekitar tiga setengah tahun juga meninggalkan berbagai persoalan yang banyak menimpa umat Islam pasca kemerdekaan. Dalam catatan Hanan, paling tidak ada tiga kebijakan Jepang yang menyebabkan rakyat Indonesia membenci Jepang; pertama, segera setelah berkuasa, Jepang memaksa kehendak untuk mengubah segala corak kebudayaan bumiputra. Semua sekolah harus bercorak Jepang dan yang tidak mematuhi akan dilarang melanjutkan kegiatannya. Pemuda dan pelajar dididik secara militer seperti *Seinendan* (untuk remaja), *keibodan* (untuk pemuda), *fuinkai* (untuk pemuda), dan *hanco* (untuk dewasa). Ringkasnya semua bercorak Jepang; kedua, Jepang melaksanakan kerja paksa (*romusha*) dan menjerat kaum perempuan Indonesia menjasi budak seks (*jugun ianfu*) bagi tentara Jepang. Para romusha ditempatkan di berbagai pangkalan militer dan kubu-kubu pertahanan. Untuk menghadapi perlawanan bumiputra, Jepang membentuk polisi militer (*kempei tai*) yang sangat terkenal sebagai algojo-algojo Jepang super kejam; ketiga, Jepang mewajibkan kepada setiap rakyat Indonesia untuk melakukan *sekkere*, yakni menyembah *Tenno Heika* (Kaisar Jepang) setiap pagi dengan cara menghadap ke arah negeri Jepang. Secara aqidah, umat Islam tidak dapat menerima hal tersebut karena sama dengan menghantarkan orang untuk berbuat syirk. Selain ketiga kebijakan ini, Jepang memberlakukan undang-undang nomor 3 yang berisi larangan terhadap segala pembicaraan dan pergerakan yang bersifat propaganda.¹³⁵

Akumulasi penjajahan (terutama Belanda dan Jepang) sebagaimana yang digambarkan di atas, jelas membawa kemunduran dan kemerosotan dalam semua segi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam pendidikan, perkembangan mentalitas bangsa dan pertumbuhan budayanya. Benda menyimpulkan, “Bangsa

¹³⁴ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, 13.

¹³⁵ Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.

Indonesia telah kehilangan mental, tabatan budaya dan politik mereka, sebagai akibat dari penjajahan yang mereka alami selama ini”.¹³⁶

Lalu bagaimana kondisi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan? Kondisi yang paling memprihatinkan dapat dibaca pada saat lima tahun sebelum kemerdekaan (1940), dimana jumlah HIS (*Hollandsch-Indlandsche School* atau sekolah untuk kaum elit tradisional pribumi di Indonesia) hanya 285 buah dengan murid 72.514 orang, jumlah Sekolah Rakyat ada 17.719 buah dengan jumlah murid hanya hampir dua juta orang (tepatnya, 1.896.371 orang). Sementara itu, penduduk Indonesia sisanya yang berjumlah jutaan jiwa adalah masyarakat yang buta huruf.¹³⁷

Kalaupun rakyat Indonesia mengenyam pendidikan, mereka dipecah kedalam dua golongan besar. Anton Timur Djaelani menjelaskan kondisi demikian sebagai sebagai berikut:

Terpisahnya pelajar-pelajar madrasah atau pesantren dengan pelajar-pelajar sekolah umum itu adalah warisan dari zaman penjajahan. Lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran rakyat Islam berupa madrasah dan pesantren itu terpaksa mengisolir atau mengasingkan diri supaya mampu bertahan dalam menghadapi desakan pengaruh Barat (terutama Belanda) yang menganut paham serba benda (materialisme). Paham Barat yang demikian pada itulah yang menghilangkan segala cita susila.¹³⁸

Selanjutnya Djaelani mengintisarikan beberapa kondisi Umat Islam pasca kemerdekaan sebagai berikut; pertama, kepincangan di dalam lapangan pendidikan. pengajaran dan kebudayaan yang berdasar kebendaan dan menghilangkan peran agama; kedua, adanya semangat budak; ketiga, kuatnya rasa kurang percaya diri (*minderwaardigheidscomplex*) dalam jiwa masyarakat Indonesia; keempat, masyarakat Indonesia memiliki jiwa yang beku (statis).¹³⁹

¹³⁶ Harry J Benda, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia,” dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1974), 26.

¹³⁷ Harsja W Bahtiar, “Sekolah Dasar”, dalam *Tempo*, Jakarta, 4 Januari 1992

¹³⁸ Anton Timur Djaelani, *Tafsir Asasi PII: Darma Bakti Pelajar Islam Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar PII, 2001), 11.

¹³⁹ Anton Timur Djaelani, *Tafsir Asasi PII: Darma Bakti Pelajar Islam Indonesia*, 12.

Secara umum, Hanan menggambarkan kondisi umat Islam pasca kemerdekaan sebagai berikut: pertama, umat Islam tetap terpecah belah kedalam berbagai organisasi, dan golongan berdasarkan kategori madzhab atau aliran tertentu; kedua, bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya harus bersiap-siap menghadapi kembalinya para penjajah ke tanah air melalui berbagai cara. Padahal tugas berat dan utama yang harus segera diselesaikan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka adalah menyiapkan pengelolaan negara secara politis maupun secara sosial dan administratif; ketiga, bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya belum memiliki kesiapan yang memadai untuk mengelola negara. Keadaan ini terutama disebabkan oleh kondisi pendidikan bangsa Indonesia yang masih memprihatinkan.¹⁴⁰

Dengan dilatarbelakangi kondisi bangsa Indonesia sebagaimana digambarkan di atas, Yoesdi Ghazali (23 Tahun) adalah salah seorang yang turut gelisah memikirkan keadaan pemuda Islam. Ia yang berlatar belakang pesantren merasakan benar kesenjangan yang terjadi antara anak-anak santri dan anak-anak sekolah umum. Di Sekolah Tinggi Islam (STI), tempat dia belajar, kesenjangan tersebut mulai memudar karena timbulnya kesepahaman antara mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan berbeda, yakni agama dan sekuler. Mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan sekuler, Lafran Pane, -misalnya- mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yoesdi sebagai pribadi yang berlatar belakang pesantren, dalam suatu kesempatan i'tikaf di Mesjid Kauman Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 1947 menangkap ide yang terlintas di benaknya yang untuk membentuk sebuah organisasi bagi para pelajar Islam.¹⁴¹

Seperti juga para pendiri JIB, SIS, maupun HMI, Yoesdi merasa tidak puas dengan wadah kepelajaran yang telah ada. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 27 September 1945, telah berdiri Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Sementara itu, di kalangan pemuda Islam sendiri telah ada beberapa organisasi kepemudaan Islam yang bersifat lokal. Namun, bagi Yoesdi aspirasi keislaman

¹⁴⁰ Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997*, 54.

¹⁴¹ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, 22.

pemuda Islam Indonesia tidak mungkin tertampung di dalam IPI yang bersifat ‘umum’ itu, serta tidak cukup tersalurkan hanya melalui organisasi lokal. Tanpa menunda waktu, Yoesdi menawarkan idenya kepadanya teman-temannya dalam sebuah pertemuan di gedung SMPN 11 Yogyakarta. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Anton Timur Djaelani, Amin Syahri, Ibrahim Zarkasyi, Noorsyaf serta Djanamar Adjam. Mayoritas dari Mereka adalah mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam) –yang kemudian menjadi UII (Universitas Islam Indonesia).¹⁴²

Selanjutnya, sebagaimana dicatat oleh Darban,¹⁴³ pada kesempatan Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang berlangsung di gedung Mu’allimin Yogyakarta, tanggal 30 Maret hingga 1 April 1947, ide Yoesdi digelorakan kembali. Pada saat itu, inti pembahasan acara sidang adalah membahas masalah kepelajaran. Anton Timur Djaelani sebagai pimpinan pusat GPII bagian kepelajaran memimpin acara sidang itu dan selanjutnya ia mempersilahkan Yoesdi untuk menguraikan gagasannya mendirikan wadah khusus bagi pelajar Islam. Setelah penyampaian gagasan itu, diselenggarakanlah diskusi antar peserta sidang yang hasilnya adalah keputusan untuk melepaskan GPII bagian pelajar yang kemudian bergabung ke dalam organisasi pelajar yang akan dibentuk.

Guna menindaklanjuti keputusan kongres di atas, diadakanlah pertemuan khusus pada tanggal 4 Mei 1947 di kantor GPII, Jalan Margomulyo no. 8 Yogyakarta. Dalam pertemuan ini hadir pula wakil-wakil dari berbagai organisasi pelajar Islam yang telah ada; Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII) yang diwakili oleh Dida Gursida dan Supomo NA, Perhimpunan Pelajar Islam Surakarta (PPIS) yang diwakili oleh Yahya Ubeid, Perhimpunan Pelajar Islam Sekolah Menengah (Persikem) yang diwakili oleh Multazam dan Shawabi dan lain sebagainya. Hasil pembicaraan dalam pertemuan ini adalah kesepakatan untuk mendirikan organisasi pelajar Islam yang tunggal dan independen dengan nama Pelajar Islam Indonesia atau dengan singkatan PII. Pada nama PII tidak ditambahkan embel-embel seperti himpunan, perkumpulan, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada konotasi semacam gerakan atau pengelompokan, tetapi

¹⁴² Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, 22.

¹⁴³ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, 22.

lebih merupakan media atau sarana pelajar untuk membina pribadi dan mengembangkan prestasi. Selain itu, dengan tidak adanya embel-embel himpunan, perkumpulan, hal ini merupakan penegasan bahwa PII juga tidak menjadi milik suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan miliki pelajar Islam dan umat Islam.¹⁴⁴

Pendirian PII ini, dinyatakan oleh Yoesdi Ghazali sebagai pemimpin rapat pada pukul 10.00 wib. Berlandaskan hal ini, maka organisasi-organisasi yang ada meleburkan diri ke dalam PII. Kemudian rapat itu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta membentuk Pengurus Besar PII yang sifatnya masih sementara. Tanggal 4 Mei itu selanjutnya disebut sebagai Hari Bangkit PII –bukan hari lahir- untuk menunjukkan bangkitnya kesadaran di kalangan pelajar Islam Indonesia sebagai pelanjut perjuangan para pemuda pelajar yang telah ada sebelumnya.¹⁴⁵

Yoesdi Ghazali sebagai penggagas berdirinya PII ternyata telah menyiapkan lambang organisasi ini.¹⁴⁶ Usulan Yoesdi pun langsung disetujui oleh peserta yang hadir dalam pertemuan itu tanpa memerlukan perdebatan panjang. Adapun yang dimaksud dengan lambang PII pada waktu itu terdiri dari warna hijau yang menunjukkan, bahwa dalam mencapai cita-citanya, Islam dijadikan sebagai lambing perdamaian. Lalu, ada warna biru yang melambangkan kesetiaan PII kepada cita-citanya itu. Warna merah putih menunjukkan lambing kebangsaan Indonesia. Bulan-bintang menunjukkan ketinggian Islam sebagai cita-cita yang diperjuangkan PII, dan kubah yang tinggi membumbung dengan lengkungan membusung melambangkan keagungan dan kebesaran Islam. Jadi, lambang PII itu berupa bangunan yang

¹⁴⁴ Taufiq Dahlan, “Pak Yoesdi Ghazali Berkisah tentang kebangkitan PII”, dalam *Dimensi*, Bulletin No. 05, thn. II Maret – Mei 1981. Deppen PB PII, h. 8. Bandingkan dengan, Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 88.

¹⁴⁵ Zilryrosa Jamil, *Sikap Politik Pelajar Islam Indonesia Dalam Menolak “Asas Tunggal”*, Skripsi S-1 di Universitas Indonesia, 1991, 39.

¹⁴⁶ HM Yoesdi Ghazali, S.H., “Dunia Pelajar Islam Indonesia: Dasa Warsa PII” dan “Lagu-Lagu PII”, dalam Moh Husnie Thamrin dan Ma’roov (eds.), *Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia*, (Jakarta: Karsa Cipta Jaya, 1998), 19-34, 114- 15, 116-20.

menunjukkan bahwa PII mendirikan organisasinya di atas landasan yang kokoh-kuat.¹⁴⁷

Dua bulan setelah peristiwa bersejarah itu, -tepatnya tanggal 14-16 Juli 1947- PII menyelenggarakan kongres pertamanya di Solo. Kongres akbar ini mendapatkan dukungan dari berbagai daerah, kelompok, maupun perorangan. Utusan-utusan yang hadir dalam acara ini mencakup kalangan “agama” maupun “umum”. Dari unsur pondok pesantren tercatat wakil-wakilnya antara lain; Tebu Ireng, Lasem, Kediri, Gontor dan Rembang, serta dari sekolah Madrasah seperti Mu’allimin dan Mu’alimat Muhammadiyah. Sedang dari sekolah umum antara lain; Sekolah kedokteran Klaten, Sekolah Tinggi Islam, Sekolah Guru dan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, hadir pula utusan dari Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PERPINDO) dari Aceh, dimana kehadirannya dalam kongres ini sekaligus memfusikan diri kedalam PII sebagaimana yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar Islam sebelumnya.¹⁴⁸

Darban mencatat, kongres ini berhasil mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pengurus Besar PII. Hal penting lainnya yang dihasilkan kongres ini adalah dikeluarkannya ikrar mengenai pengakuan bahwa hanya ada satu organisasi pelajar Islam untuk seluruh Indonesia, yaitu Pelajar Islam Indonesia. kehadiran PII kemudian mendapat sambutan positif juga dari kalangan tokoh masyarakat, di mana nama-nama seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ibu Fatmawati, K.H Wahid Hasyim, dan Panglima Besar Sudirman ikut menawarkan diri menjadi pelindung atau penasehat PII.¹⁴⁹

Dengan demikian, proses kelahiran PII, sebagaimana yang digambarkan di atas, menunjukkan adanya kesadaran bersama dari kalangan pemuda pelajar dalam mendirikan PII sebagaimana terlihat dari adanya fusi organisasi-organisasi pelajar Islam yang dilakukan secara sukarela atas inisiatif sendiri. Hal lain yang perlu

¹⁴⁷ Dikemudian hari, lambang PII mengalami penyempurnaan. Pembahasan lebih detail tentang lambang PII silahkan lihat, Pedoman Penyelenggaraan Adminitrasi (PPA) Pelajar Islam Indonesia (PII), (Jakarta: PB PII 1995-1998).

¹⁴⁸ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, 22.

¹⁴⁹ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, 25. Lihat juga, Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 88.

dicatat dari peristiwa sejarah ini adalah kata “siswa” tidak digunakan karena berasal dari bahasa sansekerta, dan munculnya kata itu pun karena ada kata “mahasiswa”.

Menurut catatan Hanan, pada waktu berdirinya PII, kata “siswa” belum digunakan. Sementara, kata “pelajar” mempunyai arti yang lebih luas dan mendalam. “Pelajar” yang dimaksudkan disini adalah kelompok yang belajar mulai dari tingkat *ibtidâiyyah* (Sekolah Dasar), *tsânawiyyah* (Sekolah Menengah Pertama) hingga *‘âliyyah* (Sekolah Menengah Pertama/Umum). Sementara, belajar merupakan kewajiban bagi semua orang. Sedangkan kelompok yang telah memasuki perguruan tinggi memang namanya “mahasiswa”, akan tetapi pada dasarnya adalah pelajar. Kata “mahasiswa” dan “pelajar” dalam bahasa Inggris memiliki terjemahan yang sama yakni *student*. Sementara dalam bahasa Arab keduanya diterjemahkan dengan kata *thâlib*. Akan tetapi, PII memang diorientasikan sebagai organisasi untuk kelompok anak Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjut Tingkat Atas, termasuk pelajar sekolah persiapan. Meski demikian, biasanya kepengurusan PII tingkat pusat biasanya diisi oleh pelajar yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.¹⁵⁰

PII bangkit dengan latar belakang sosio-politik ketertindasan umat Islam. Berdasarkan hal ini, motivasi kebangkitan PII menurut *Ensiklopedi Islam Indonesia*,¹⁷⁴ didorong oleh dua hal, yaitu: Pertama, motivasi yang bertitik tolak dari ajaran agama. dan Kedua, motivasi yang bertitik tolak dari tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.¹⁵¹ Dalam ungkapan yang lebih sederhana, Hanan menyebutkan bahwa motivasi kebangkitan PII didorong oleh motivasi keislaman dan motivasi kebangsaan.¹⁵²

C. Membaca Komitmen Keislaman dan Kebangsaan PII

Komitmen keislaman dan kebangsaan PII dapat dibaca di dalam dokumen Falsafah Gerakan PII yang merupakan paradigma gerakan dan sikap PII terhadap berbagai isu serta persoalan-persoalan prinsip. Di kalangan internal PII, Falsafah

¹⁵⁰ Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara*, 58.

¹⁵¹ Masyhuri A.M, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1987), 711.

¹⁵² Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara*, 54.

Gerakan didefinisikan sebagai suatu formulasi konseptual cara pandang PII terhadap aspek-aspek fundamental dari misi dan eksistensinya yang menjadi dasar paradigma gerakan PII.¹⁵³

Sebagai sebuah gerakan yang lahir di Indonesia, PII memiliki sejumlah pandangan yang khas mengenai realitas keindonesiaan. Pandangan itu menjelaskan bahwa PII adalah gerakan yang menjadi bagian dari narasi besar Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan beberapa gerakan Islam seperti Hizbut Tahrir atau gerakan transnasional lainnya yang memiliki narasi berbeda dengan Indonesia.

Bagi PII, Indonesia dipahami dalam empat kerangka besar ini, yaitu: pertama, Indonesia sebagai konteks sosio-historis aktualisasi Islam; kedua, Indonesia sebagai satuan wilayah *nation society* (masyarakat bangsa); ketiga, Indonesia sebagai satuan wilayah *nation state* (Negara bangsa); keempat, Indonesia sebagai satuan komunitas wilayah dakwah.¹⁵⁴

a. Indonesia sebagai konteks sosio-historis aktualisasi Islam

Sejarah Indonesia tidak lepas dari sejarah tumbuh-kembangnya agama Islam. Pengaruh dari para penyebar Islam yang membuka hubungan dengan para penguasa lokal Nusantara sejak abad ke-7 telah memberikan pengaruh terhadap berkembangnya agama Islam.¹⁵⁵ Beberapa wilayah di Nusantara yang sangat subur persebarannya pada masa-masa itu antara lain: kesultanan Samudera Pasai, Ternate, Tidore, Ternate, Gowa, Banten, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Islam telah berkembang menjadi satu agama dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

¹⁵³ “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, dalam Sekretariat Jenderal Pelajar Islam Indonesia, *Kumpulan Keputusan dan Ketetapan Muktamar Nasional ke-26 Pelajar Islam Indonesia (PII)*, (Jakarta: PB PII 2008-2010), h. 126. “Falsafah Gerakan PII”, dalam Sekretariat Jenderal Pelajar Islam Indonesia, *Kumpulan Keputusan dan Ketetapan Muktamar Nasional ke-26 Pelajar Islam Indonesia (PII)*, (Jakarta: PB PII 2008-2010), h. 126. Elaborasi lebih dalam terkait posisi falsafah gerakan bagi gerakan PII, silahkan lihat, Parid Ridwanuddin, *Paradigma Gerakan Pelajar Islam Indonesia: Telaah terhadap Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia*, Jakarta: Skripsi, Universitas Paramadina, 2010.

¹⁵⁴ PII, “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia” 147-148

¹⁵⁵ Azyumardi Azra menyebutkan fase-fase hubungan antara Islam Timur Tengah dengan Islam Nusantara yang dimulai dari hubungan ekonomi dan dagang, kemudian disusul dengan hubungan politik keagamaan, dan selanjutnya diikuti dengan hubungan intelektual keagamaan. Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), 23.

Realitas sejarah membuktikan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu tumpuan para penyebar agama Islam pada masa itu tidak terbantahkan. Oleh karena itu, Falsafah Gerakan menegaskan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia telah menjadi ruang aktualisasi Islam. Komitmen terhadap kenyataan sejarah ini penting dilakukan dengan pemaknaan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah yang integral dengan aktualisasi Islam, sehingga Islam mendapatkan pengaruh yang sangat besar di Indonesia sampai sekarang.¹⁵⁶

Pandangan pertama mengenai keindonesiaan ini mengisyaratkan bahwa Islam pada hakikatnya merupakan ajaran universal yang sesuai dengan setiap tempat dan waktu (*shâlihun li kulli zamân wa makân*). Akan tetapi, universalitas itu harus diterjemahkan dalam konteks yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki kompleksitas dan problem yang berbeda dengan bangsa muslim lainnya didunia. Pada titik ini, Falsafah Gerakan mengisyaratkan bahwa pribumisasi Islam atau kontekstualisasi Islam –meminjam istilah Gus Dur dan Cak Nur– merupakan satu keniscayaan.

Pandangan ini juga menegaskan bahwa ada satu ikatan yang tidak dipisahkan antara kesadaran keislaman dengan kesadaran keindonesiaan yang sudah teranyam kuat dalam alam pikiran PII. Begitu intimnya hubungan Islam dengan Indonesia dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang, maka sebutan yang tepat untuk hal ini adalah “sejarah Indonesia” bukannya “sejarah Islam di Indonesia”.¹⁵⁷

b. Indonesia sebagai satuan wilayah *nation society* (masyarakat bangsa)

Falsafah Gerakan menegaskan bahwa Indonesia sebagai *nation society* mulai mendapatkan bentuknya lebih nyata pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda Indonesia saat itu menyatakan ikrar “berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu Tanah Air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia”.¹⁵⁸

¹⁵⁶ “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 147.

¹⁵⁷ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, (Jakarta-Bandung: Yayasan Festival Istiqlal-Mizan, 2006), xv.

¹⁵⁸ “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 147.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang diikat dalam satu paham kebangsaan. Pluralitas ini membawa pengaruh terhadap pluralitas budaya, adat, agama serta kepercayaan yang dianut. Islam sebagai agama dengan pemeluk mayoritas telah memberikan kontribusi dalam mengikat berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dalam satu ikatan keagamaan.¹⁵⁹ Dengan demikian, peran serta umat Islam dalam pemeliharaan kebangsaan ini pun menduduki posisi yang sangat penting karena telah merekatkan ikatan batin bagi masyarakat Indonesia.

Komitmen PII kepada Indonesia sebagai *nation society* diwujudkan dalam bentuk upaya meningkatkan kuantitas umat Islam dalam komposisi penduduk Indonesia. Dengan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar umat Islam Indonesia dapat “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” dengan bangsabangsa lain di seluruh dunia. Untuk itu, PII berperan aktif dalam prakarsa meningkatkan kualitas bangsa terutama umat Islamnya dalam konteks globalisasi.¹⁶⁰

Pandangan kedua mengisyaratkan pengakuan dan penghargaan PII mengenai pluralitas suku, budaya, adat, bahasa, agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Pluralitas itu kemudian diikat oleh kesadaran kebangsaan yakni perasaan akan adanya kebersamaan dan persaudaraan sebagai komunitas bangsa Indonesia. Dengan tegas Falsafah Gerakan menyatakan bahwa Islam telah berhasil menghapus kesadaran kesukuan yang bersifat *chauvinistic* dalam masyarakat Indonesia dan menggantikannya dengan kesadaran kebangsaan yang berhasil membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Islam adalah perekat bagi masyarakat Indonesia.

c. Indonesia sebagai satuan wilayah *nation state* (Negara bangsa)

Indonesia sebagai sebuah Negara terbentuk pada 17 Agustus 1945, pada saat Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia telah merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa manapun. Kemerdekaan yang telah dicapai dan tegaknya

¹⁵⁹ Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, xv-xxiv.

¹⁶⁰ “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 148.

kedaulatan Negara merupakan tujuan semua pergerakan umat Islam saat itu. Pembukaan UUD 1945 dengan sangat indah menuturkan kemerdekaan Indonesia itu dengan kalimat, “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Komitmen PII terhadap Negara bukan diberikan kepada pemerintah (penguasa), melainkan kepada eksistensi Negara itu sendiri. Eksistensi Negara, di dalamnya mencakup fungsi-fungsi keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, komitmen PII terhadap Negara adalah komitmen penegakan atau transformasi nilai-nilai ketuhanan berupa cinta keadilan, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran.¹⁶¹

Pandangan ketiga mengisyaratkan pengakuan PII terhadap Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*). Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Ia adalah negara untuk keseluruhan umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuan Negara bangsa adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-Mashlat al-Mursalah* atau *al-Mashlat al-'Ammah/generale welfare*), yaitu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga Negara tanpa kecuali.¹⁶²

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa PII menekankan komitmennya kepada Indonesia sebagai sebuah Negara yang mencakup fungsi-fungsi keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat. PII dengan tegas tidak mengakui pemerintah (penguasa) yang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk menjalankan keadilan, memelihara kesejahteraan, dan memakmurkan rakyatnya.

d. Indonesia sebagai satuan komunitas wilayah dakwah

Salah satu esensi ajaran Islam adalah mendakwahkan Islam. Konsekuensi ini mensyaratkan penentuan komunitas mana yang akan dijadikan sasaran seruan dakwah tersebut. Sejak awal didirikan, PII menjadikan wilayah Indonesia sebagai komunitas dakwahnya. Hal ini tidak berarti ada keterpurusan hubungan komunitas

¹⁶¹ “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 148.

¹⁶² Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), 42-3.

satu dengan lainnya, dan menceraikan potensi dakwah umat Islam di dunia. Bagi PII, komunitas dakwah harus merupakan ikatan yang saling berhubungan ibarat mata rantai yang saling menguatkan satu sama lain. Penentuan komunitas ini lebih didasarkan pada realitas empiris, sosiologis, dan kemampuan daya jangkau jaringan yang dimilikinya.¹⁶³

Komitmen PII terhadap Indoensia sebagai satuan komunitas wilayah dakwah, mengandung arti bahwa PII akan menjaga kondisi wilayah ini agar senantiasa kondusif bagi keberlangsungan dakwah Islam. Berbagai hal, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun keamanan yang ditengarai akan menjadi kendala, hambatan atau bahkan ancaman terhadap keberlangsungan dakwah di Indonesia akan menjadi bagian tanggungjawab PII untuk menghadapi dan mengantisipasinya.¹⁶⁴

Pandangan keempat menegaskan bahwa Falsafah Gerakan bahwa Islam harus senantiasa memberikan kontribusi, menawarkan solusi sekaligus menjaga eksistensi Indonesia. oleh sebab itu, Berbagai hal yang ditengarai akan menjadi kendala, hambatan atau bahkan ancaman terhadap hal ini akan menjadi tanggungjawab PII untuk menyelesaikannya.

Meskipun memiliki komitmen keislaman dan keindonesiaan yang sangat kuat, tetapi di dalam sejarahnya PII pernah melakukan penolakan terhadap Asas Tunggal Pancasila yang pernah diberlakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Karena menolak Pancasila sebagai Asa Tunggal, secara legal keberadaan PII pernah dibekukan oleh Pemerintah Soeharto.¹⁶⁵ Dan karena penolakan ini, Dr. Syafi'i Anwar, menempatkan PII dalam barisan organisasi yang memiliki orientasi *syari'ah minded*, memiliki penafsiran literal dan percaya terhadap teori konspirasi.¹⁶⁶

¹⁶³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 42-3.

¹⁶⁴ "Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia", 149.

¹⁶⁵ Uraian lengkap mengenai hal ini silahkan baca, Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997* (Yogyakarta: UII Press, 2006)

¹⁶⁶ Syafi'i Anwar, "Gerakan Muslim Modernis: pergumulan wacana dan Politik Pasca Orde Baru", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, 771. Bandingkan dengan, Komaruddin Hidayat dan Ahmad

Lalu bagaimana menjelaskan hubungan antara komitmen keindonesiaan PII dengan penolakan kerasnya terhadap Asas Tunggal Pancasila? Terkait hal ini, Hanan memiliki catatan menarik. Ia menulis:

PII, sebagai sebuah pergerakan Islam yang lahir pada era pasca kemerdekaan, sebetulnya adalah organisasi yang modernis, dan tidak fundamentalis. Berdasarkan hal ini, sikap PII terhadap Pancasila dapat dipahami dengan beberapa hal; Pertama, sikap itu lebih merupakan ekspresi protes atas tindakan represif dan intimidasi oleh militer yang menguasai rezim Orde Baru; Kedua, suasana kepemimpinan yang kebetulan dominan di PII saat itu dipegang oleh kelompok yang cenderung fundamentalis dalam sikap-sikap politik; Ketiga, sikap PII dalam menolak Asas Tunggal Pancasila tidak sesederhana yang dibayangkan, di dalamnya ada persoalan komitmen PII terhadap demokrasi dan independensi organisasi.¹⁶⁷

Dari pernyataan Hanan tersebut, dapat dikatakan bahwa pandangan fundamentalis yang ada di PII adalah pandangan yang tidak terkait dengan permasalahan lembaga melainkan pandangan yang sangat terkait faktor-faktor personal-individual dan bersifat temporal. Dalam pernyataan lain, pandangan-pandangan yang terbuka terhadap berbagai kemajuan merupakan pandangan yang bersal dari PII. Sedangkan pandangan-pandangan yang tertutup adalah pandangan yang individu yang tidak merepresentasikan PII.

D. Kesimpulan

Di dalam gerakannya, PII tidak memiliki pandangan dikotomis yang memisahkan Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai bangsa. Sebaliknya, agama dan bangsa saling membutuhkan dan menguatkan. Pandangan ini berbeda secara diametral dengan gerakan-gerakan Islam trans-nasional, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, yang secara eksplisit menolak pandangan kebangsaan dan menyebutkan pandangan tersebut tidak memiliki landasannya di dalam ajaran Islam.

Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), xix.

¹⁶⁷ Djayadi Hanan, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara*, 222-23.

Bagi PII, keberadaan bangsa-bangsa merupakan *sunnatullah* dan dinyatakan di dalam Kitab Suci al-Qur'an. Oleh karena itu menolak keberadaan bangsa-bangsa serta paham kebangsaan sesungguhnya menolak gagasan al-Qur'an. Oleh karena itu, sikap terbaik yang harus dilakukan adalah terlibat aktif membangun bangsa Indonesia, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan yang memanusiakan manusia. Cara lain untuk terlibat membangun bangsa adalah dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam negeri ini.

Pandangan-pandangan yang masih membenturkan Islam dan Indonesia sudah tidak memiliki tempat di Indonesia, baik secara akademis maupun praksis. Pandangan semacam ini adalah produk masa lalu yang kuno dan sangat terbelakang. Islam adalah Indonesia dan Indonesia adalah Islam. Oleh karena itu umat Islam harus menjadi pemain utama bangsa ini. Inilah intisari komitmen keislaman dan komitmen kebangsaan PII.

Daftar Pustaka

- Ali, Fachry dan Effendy Bahtiar, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986
- A.M, Masyhuri, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1987
- Anwar, M. Syafi’I, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995
- “Gerakan Muslim Modernis: pergumulan wacana dan Politik Pasca Orde Baru”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Jakarta-Bandung: Yayasan Festival Istiqlal-Mizan, 2006
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994
- Bahtiar, Harsja W, “Sekolah Dasar”, dalam *Tempo*, Jakarta, 4 Januari 1992
- Barton, Greg, *Gagasan Islam liberal di Indoensia: Telaah Terhadap Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Benda, Harry J, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia,” dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Islam di Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1974
- Dahlan, Taufiq, “Pak Yoesdi Ghazali Berkisah tentang kebangkitan PII”, dalam *Dimensi*, Bulletin No. 05, thn. II Maret – Mei 1981. Deppen PB PII
- Darban, Ahmad Adaby, *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia*, Yogyakarta: Panitia Daerah Mukhtamar XIV Pelajar Islam Indonesia, 1976
- Djaelani, Anton Timur, *Tafsir Asasi PII: Darma Bakti Pelajar Islam Indonesia*, Jakarta: Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar PII, 2001
- Ghazali, S.H., HM Yoesdi, “Dunia Pelajar Islam Indonesia: Dasa Warsa PII” dan “Lagu-Lagu PII”, dalam Moh Husnie Thamrin dan Ma’roov (eds.), *Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia*, Jakarta: Karsa Cipta Jaya, 1998

- Hanan, Djayadi, *Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Hidayat, Komaruddin dan AF, Ahmad Gaus (eds.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Jakarta-Bandung: Yayasan Festival Istiqlal-Mizan, 2006
- , *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Jamil, Zilryrosa, *Sikap Politik Pelajar Islam Indonesia Dalam Menolak "Asas Tunggal"*, Skripsi S-1 di Universitas Indonesia, 1991
- Latief, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Muslim Indonesia Abad ke-20*, Mizan: Bandung, 2005
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2005
- , *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina, 2004
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamâ'at Al-Islâmî (Pakistan)*, terj. Mun'im A Sirry, Jakarta: Paramadina, 1999
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Pedoman Penyelenggaraan Adminitrasi (PPA) Pelajar Islam Indonesia (PII), Jakarta: PB PII 1995-1998
- Ridwanuddin, Parid, *Paradigma Gerakan Pelajar Islam Indonesia: Telaah terhadap Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia*, Skripsi S1 di Universitas Paramadina, 2010.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Stoddard, F.L., *Dunia Baru Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1987
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

Tim Penyusun, “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, dalam dokumen Sekretariat Jenderal Pelajar Islam Indonesia, *Kumpulan Keputusan dan Ketetapan Muktamar Nasional ke-26 Pelajar Islam Indonesia (PII)*, Jakarta: PB PII 2008-2010

Wildan, Muhammad, *Student and Politics; the Response of the Pelajar Islam Indonesia (PII) to Politisc in Indonesia*, Tesis S2 di Leiden University, 1999

Zubaidi, HM. Natsir, dan Rais, Lukman Fathullah, *Pak Timur Menggores Sejarah: PII Menyiapkan Kader Umat dan Bangsa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997